



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. LkjIP disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan kebijakan program kerja/kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai selama tahun 2019 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya dan Aparatur Sipil Negara pada khususnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini.

Luwuk, 14 Februari 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banggai



SOEFFIAN DATU ADAM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199603 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Laporan ini merupakan Media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Interen atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan system pengendalian internal termasuk pembinaan kapabilitas Aparatur.

Penyusunan laporan kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga komitmen untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, sebagai cerminan dari Misi 1 **yaitu Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa.**

Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya melaksanakan 7 program dan 49 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung **Rp.5.077.082.320,-**. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.865.901.116,-** atau sebesar **95.84%** yang artinya dalam pelaksanaannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat mengefesiesikan biaya dalam memaksimalkan semua program dan kegiatannya.



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

Upaya pencapaian kinerja di tahun 2019 merupakan lanjutan dan perbaikan dari hambatan yang dihadapi di tahun 2018 maupun upaya mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai sejak tahun 2018. Hal ini menjadi motivasi Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai untuk melangkah menjadi lebih baik dan maju pada tahun-tahun selanjutnya dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja demi terwujudnya *good governance*.

Luwuk, 14 Februari 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banggai



SOEFFIAN DATU ADAM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199603 1 003

iii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3
1.3. Isu Strategis	6
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	11
2.1.1. Visi	11
2.1.2. Misi	12
2.2. Strategi dan Kebijakan.....	13
2.3. Indikator Kinerja Utama	14
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2019	16
2.5. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja.....	22
A. Target dan Realisasi Kinerja	22
B. Perbandingan Target Tahun 2019 dan Tahun Sebelumnya.....	23



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

C.	Perbandingan Capaian Kinerja dan target jangka menengah	25
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan	44
E.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
3.2.	Realisasi Anggaran.....	45

BAB IV PENUTUP

v



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 berdasarkan jenis pendidikan	3
Tabel 1.2. Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.3. Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin	5
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23
Tabel 3.2. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 dan tahun sebelumnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24
Tabel 3.3. Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47
Tabel 3.5. Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1. Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 berdasarkan jenis pendidikan	4
Grafik 1.2. Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 berdasarkan Golongan	5
Grafik 1.3. Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin	6



IKHTISAR EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Laporan ini merupakan Media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Interen atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan system pengendalian internal termasuk pembinaan kapabilitas Aparatur.

Penyusunan laporan kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga komitmen untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, sebagai cerminan dari Misi 1 **yaitu Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa.**

Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya melaksanakan 7 program dan 49 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung **Rp.5.077.082.320,-**. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.865.901.116,-** atau sebesar **95.84%** yang artinya dalam pelaksanaannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat mengefesienkan biaya dalam memaksimalkan semua program dan kegiatannya.

Upaya pencapaian kinerja di tahun 2019 merupakan lanjutan dan perbaikan dari hambatan yang dihadapi di tahun 2018 maupun upaya mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai sejak tahun 2018. Hal ini menjadi motivasi Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

Manusia Kabupaten Banggai untuk melangkah menjadi lebih baik dan maju pada tahun-tahun selanjutnya dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja demi terwujudnya *good governance*.

Luwuk, 14 Februari 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banggai

SOFFIAN DATU ADAM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199603 1 003

iii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3
1.3. Isu Strategis	6
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	11
2.1.1. Visi	11
2.1.2. Misi	12
2.2. Strategi dan Kebijakan.....	13
2.3. Indikator Kinerja Utama	14
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2019	16
2.5. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja.....	22
A. Target dan Realisasi Kinerja	22
B. Perbandingan Target Tahun 2019 dan Tahun Sebelumnya.....	23



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

C.	Perbandingan Capaian Kinerja dan target jangka menengah	25
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan	44
E.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
3.2.	Realisasi Anggaran.....	45

BAB IV PENUTUP



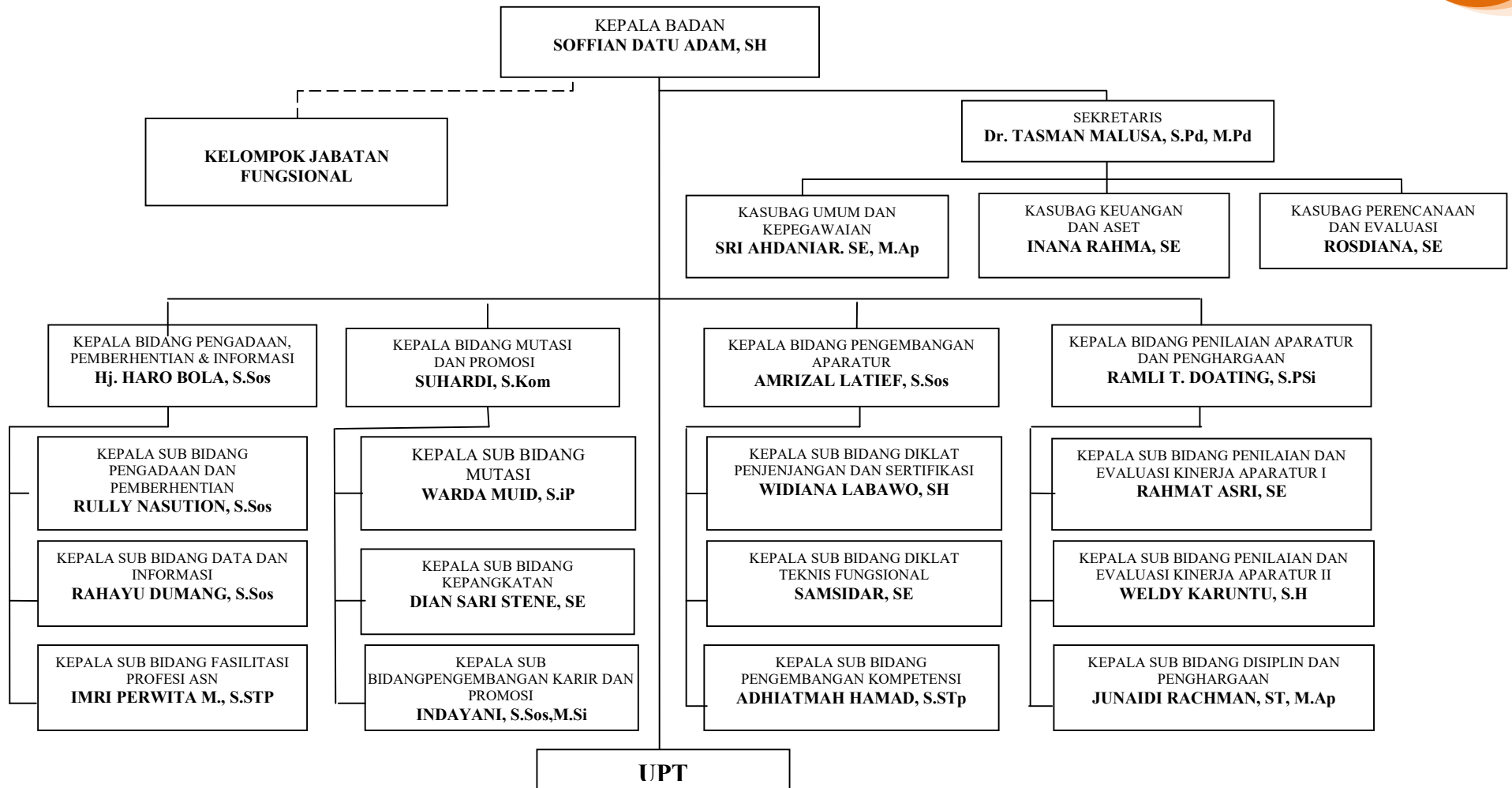
BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat digambarkan sebagai berikut :





1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

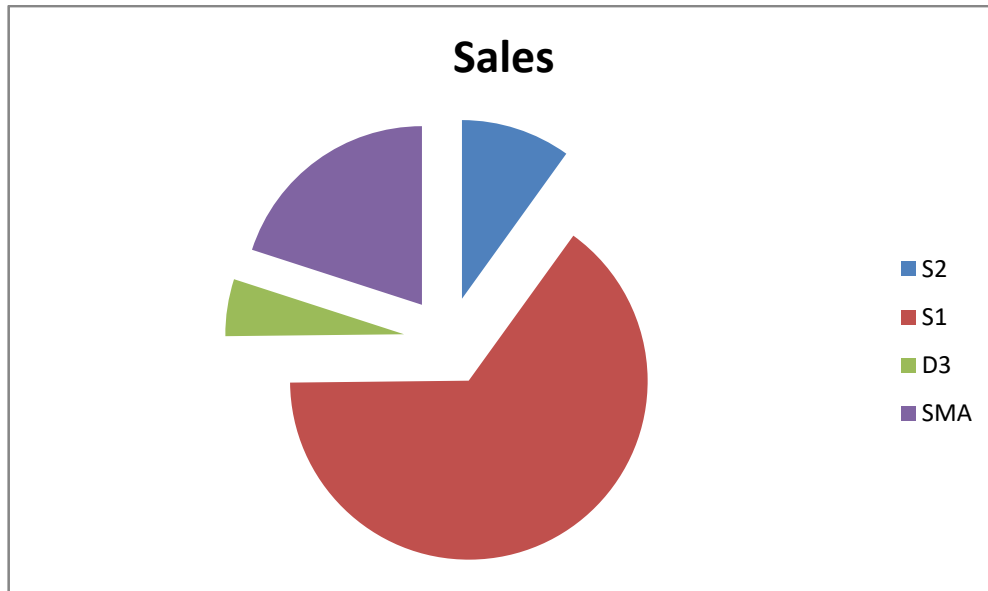
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dipimpin oleh Kepala Badan dengan eselon II-b yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang. Dalam melaksanakan kegiatannya BKPSDM Kab. Banggai didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 48 ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019
Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	4	8.3
2.	S1	26	54.2
3.	D3	8	4.3
4.	SMA	9	16.7
Jumlah		48	100



Grafik 1.1.
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019
Berdasarkan Jenis Pendidikan

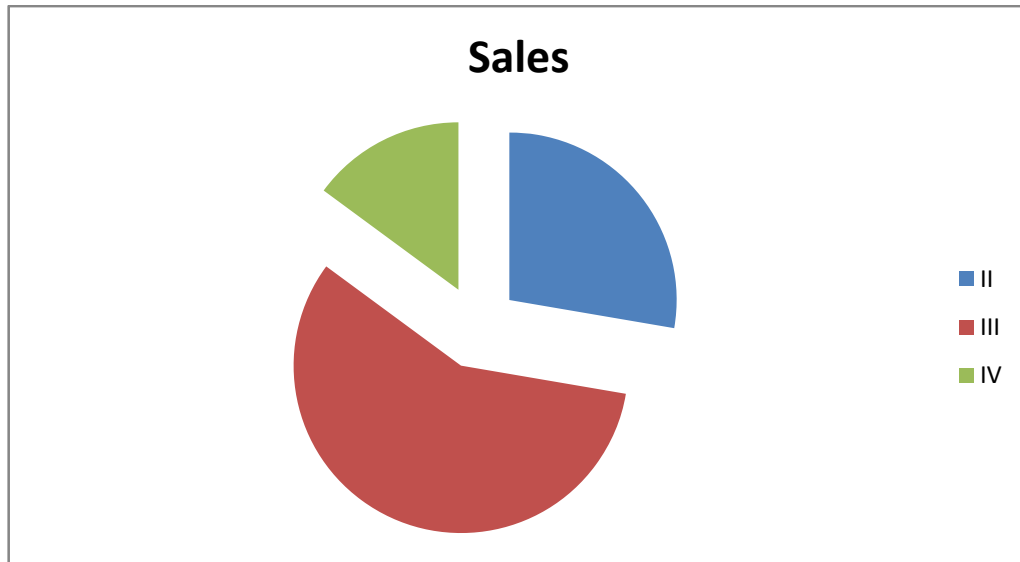


Tabel 1.2.
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan/Ruang	Jumlah	%
1.	II	13	27.7
2.	III	27	57.4
3.	IV	7	14.9
Jumlah		48	100



Grafik 1.2
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019
Berdasarkan Golongan

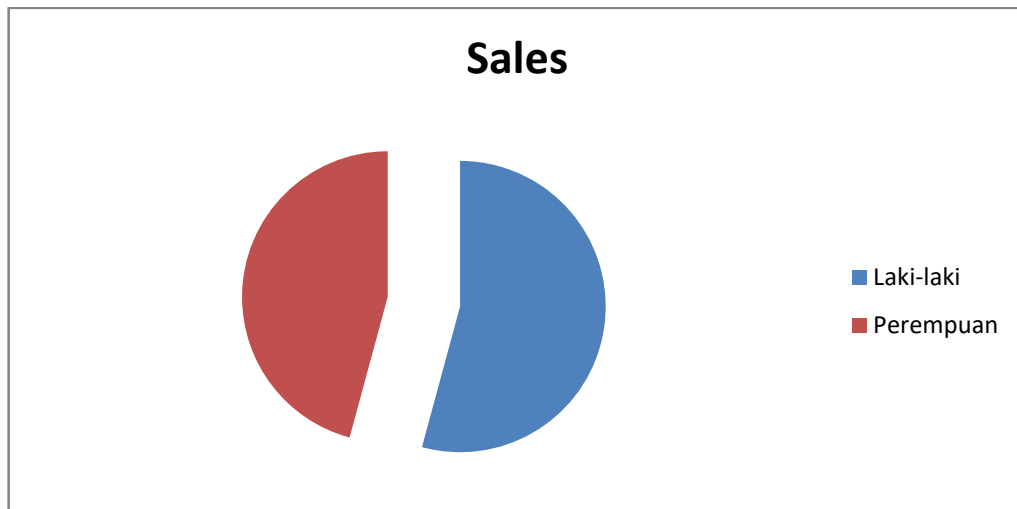


Tabel 1.3
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	26	54.2
2.	Perempuan	22	45.8
Jumlah		48	100



Grafik 1.3
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019
Berdasarkan Jenis Kelamin



1.3. Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah merupakan kejadian atau kondisi berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang berdampak kepada kerugian dalam perencanaan pembangunan. Adapun isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhi penempatan dalam Jabatan sesuai standar Kompetensi dan Kualifikasi. Berdasarkan Permenpan Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melaksanakan rotasi atau mutasi jabatan juga harus mengikuti aturan bahwa penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi yang dimaksud bukan hanya sekedar pendidikannya tapi juga dilihat dari pengalaman kerja.



2. Belum optimalnya system Informasi Kepegawaian berbasis teknologi Informasi
Dalam hal ini pelayanan kepegawaian belum mempunyai system yang kompleks dan belum terintegrasi Hal ini juga dikarenakan belum tersedianya Sistem Aplikasi Daerah berbasis elektronik pada Pelayanan administrasi Kepegawaian secara otomatis (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Penetapan NIP), E-Kinerja
3. Terdapat pejabat structural yang belum melaksanakan Diklat Pimpinan sesuai jenjang kariernya.
Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kapasitas pegawai juga berkontribusi atas minimnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional ataupun manajerial.
4. Belum adanya Fasilitas Kediklatan
Belum lengkapnya sarana dan prasarana kediklatan sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih menggunakan pola pengiriman yang tentunya menggunakan anggaran yang cukup besar.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Banggai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2294);



1.5. Sistematika Penyusunan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pada BAB I menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Pada BAB II menyajikan uraian/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019
3. Pada BAB III menyajikan akuntabilitas kinerja berupa capaian kinerja organisasi, dan analisis capaian kkerja serta realisasi anggaran sesuai dokumen perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai,
4. BAB IV adalah bab penutup.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan.

Tujuan dari Rencana Strategis adalah menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang memuat program dan kegiatan.

2.1.1. Visi

Untuk Tahun 2016-2021 VISI Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya”**. Makna yang terkandung didalam Visi tersebut



terhadap kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang mengelola manajemen sumber daya aparatur dituntut mengembangkan dan memantapkan aparatur pemerintah kabupaten banggai yang baik, bersih dan berbudaya.

2.1.2. Misi

Dari Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa
2. Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi Pertanian
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Misi kabupaten banggai tahun 2016-2021 berkaitan dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai adalah Misi-1 Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.



2.2. Strategi dan Kebijakan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2016

– 2021 menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kabupaten banggai	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Peningkatan Kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan tingkat IV, III dan II
			Peningkatan jabatan fungsional.
			Penegakan Disiplin ASN melalui penerapan reward dan funishment
			Peningkatan budaya dan etos kerja ASN.
			Pengembangan system informasi manajemen SDM Aparatur yang komprehensif dan terintegrasi



	Meningkatkan tata kelola BKPSDM yang baik, bersih, dan akuntabel	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government.	Meningkatkannya disiplin dan kinerja aparatur
		Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai.	Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Banggai dan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan terdapat pada table berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Presentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pratama, Administrator dan Pengawas $\frac{\sum \text{PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi}}{\sum \text{keseluruhan PNS yang menduduki jabatan}} \times 100 \%$	Seluruh bidang di BKPSDM
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	Data pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu pelanggaran yang sudah dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 $\frac{\sum \text{PNS yang tidak melakukan pelanggaran disiplin}}{\sum \text{keseluruhan PNS di kabupaten banggai}} \times 100 \%$	Data pelanggaran disiplin



2.4. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk menyusun skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan dan diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia terdapat 7 (Tujuh) Program dan 50 (lima puluh) kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Prioritas

1. Program Pendidikan Kedinasan
 - Pendidikan dan pelatihan teknis
 - Pendidikan penjenjangan struktural
2. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
 - Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
 - Seleksi penerimaan calon PNS
 - Penempatan PNS
 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
 - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
 - Pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas



- Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat , Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)Program Rutin
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses mutasi PNS
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS
- Pengelolaan administrasi pensiun PNS
- Pengambilan sumpah bagi CPNS
- Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai
- Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen
- Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS
- Dukungan Pelaksanaan Fasilitas Profesi ASN
- Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I
- Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur II
- Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

➤ **Program Rutin**

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
 - Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan meubeler
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
 - Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintahan Kabupaten Banggai



Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2019
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target	Satuan	Program
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Presentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	50	%	Program pendidikan kedinasan
		60	%	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		80	%	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	80	%	Program pembinaan dan pengembangan aparatur

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja untuk setiap Program/Kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai untuk tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut dibuat antara Kepala BKPSDM dengan Bupati Banggai, Kepala BKPSDM dengan Sekretaris dan Para Kepala Bidang, Sekretaris dengan para Kasubag, Kepala Bidang dengan para Kasubid, para kasubid/kasubag dengan para staf.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kabupaten banggai	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Presentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	➤ Program pendidikan kedinasan	192.623.000
				➤ Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.514.933.000
				➤ Program pembinaan dan pengembangan aparatur	40.000.000
			Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	➤ Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.790.516.320



		Meningkatnya tata kelola BKPSDM yang baik, bersih, dan akuntabel	Nilai Kinerja	Akuntabilitas	➤ Program Pelayanan Adm. Perkantoran ➤ Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ➤ Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ➤ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.119.493.350 278.016.650 55.000.000 86.500.000
--	--	--	---------------	---------------	---	--



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1(satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

A. Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kab. Banggai adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Presentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	50%	54%	108%
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	80%	99.24%	124%
Meningkatnya tata kelola BKPSDM yang baik, bersih, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

B. Perbandingan Target Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya

Perbandingan target kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini ada beberapa bagian yang sudah memenuhikan melampaui target dan ada beberapa yang belum. Ini menunjukkan bahwa Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai. Dari rencana kinerja yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dengan target kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat dari table berikut :



Tabel 3.2.
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 dan tahun sebelumnya
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET			PROGRAM
			2017	2018	2019	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kabupaten banggai	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Presentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	50%	50%	50%	Program pendidikan kedinasan
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
						Program pembinaan dan pengembangan aparatur
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	60%	70%	80%	Program pembinaan dan pengembangan aparatur



C. Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah

➤ Urusan Prioritas

1) Program Kedinasan

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian
			Target	Realisasi	Kinerja
1.	Pendidikan Pelatihan Teknis	- Jumlah yang mengikuti Diklat Teknis Ujian Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas	180	178	98.9%
		- Jumlah yang mengikuti Diklat Teknis	2	2	100%
2.	Pendidikan Penjenjangan Struktural	- Jumlah yang mengikuti pendidikan penjenjangan structural PIM III	2	2	100%
		- Jumlah yang mengikuti pendidikan penjenjangan structural PIM IV	2	2	100%

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 85.588.000,- realisasi keuangan Rp. 85.340.000,- atau sebesar 99.71% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah pejabat yang lulus mengikuti diklat teknis dengan Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas 75 ASN, ujian penyesuaian ijasah 103 ASN, dan Diklat teknis 2 ASN.



2. Pendidikan Perjenjangan Struktural, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 107.035.000,- realisasi keuangan Rp. 84.710.000,- atau sebesar 79.14% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah pejabat yang memiliki sertifikat diklat struktural dengan Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM III 2 ASN dan Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM IV 2 ASN.

2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian
			Target	Realisasi	Kinerja
1.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah yang mengikuti LATSAR CPNS	150 CPNS	151 CPNS	100,7%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	2 ASN	2 ASN	100%

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.471.833.000,- realisasi keuangan Rp. 1.454.549.673,- atau sebesar 98.83% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah yang mengikuti LATSAR CPNS dengan jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 151 CPNS.



2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 43.100.000,- realisasi keuangan Rp. 43.091.400,- atau sebesar 99.98% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah yang mengikuti diklat fungsional dengan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional 2 PNS

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir	- Jumlah jabatan yang terisi	500	487	97.4%
2.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	- Jumlah CPNS yang lolos seleksi	100	149	149%
3.	Penempatan PNS	- Jumlah penempatan PNS	150	19	12.7%
4.	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	- Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu yang disetujui	1,500	1.420	94.7%
5.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Jumlah Aplikasi yang tersedia	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
6.	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	- Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya	80	118	147.5%



7.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	- Jumlah kasus Pelanggaran disiplin yang diselesaikan	100	59	59%
8.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	- Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta bantuan tugas belajar	15 ASN	2 ASN	13.3%
9.	Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat,, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah kebutuhan diklat sesuai dengan hasil analisis	1 Laporan	1 Laporan	100%
12.	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses mutasi PNS	- Jumlah mutasi PNS yang disetujui	500 PNS	150 PNS	30%
13.	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS	- Jumlah usulan bezetting e-formasi aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
14.	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS	- Jumlah kenaikan gaji berkala yang tepat waktu yang tertangani	1.500 PNS	3.448 PNS	229.9%



15.	Pengelolaan administrasi pensiun PNS	- Jumlah pensiun yang terlaksana	200 ASN	170 ASN	85%
16.	Pengambilan sumpah bagi CPNS	- Jumlah PNS yang mengikuti sumpah	150 ASN	0ASN	0%
17.	Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai	- Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin PNS	400 ASN	400 ASN	100%
18.	Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen	- Jumlah pengadaan karis/karsu - Jumlah pengadaan Kartu Pegawai - Jumlah pengadaan Taspen	150 Kartu 140 Kartu 10 Kartu	178 Kartu 182 Kartu 12 Kartu	118.7% 130% 120%
19.	Pengelolaan adm. Kasus/ sengketa perkawinan dan perceraian PNS	- Jumlah penanganan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS	30	40 Kasus	133.3%
20.	Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN	- Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang di fasilitasi	2 Keg.	2 Keg.	100%
21.	Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I	- Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan struktural	23 Kec,	23 Kec	100%



22.	Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur II	- Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan fungsional	23 Kec,	23 Kec	100%
23.	Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan	- Jumlah PNS yang memenuhi syarat dalam kompetensi jabatan	39 PNS	39 PNS	100%

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi keuangan Rp. 60.000.000,- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah jabatan yang terisi dengan Jumlah jabatan yang terisi 487 jabatan.
2. Pelaksanaan Penyaringan/Seleksi Penerimaan CPNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 125.042.000,- realisasi keuangan Rp. 122.117.800,- atau sebesar 97.66% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah CPNS yang lolos seleksi dengan Jumlah CPNS yang lolos 149 CPNS.
3. Penempatan PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 23.500.000,- realisasi keuangan Rp. 23.500.000,- atau realisasi sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Terpenuhinya Penempatan PNS dengan Jumlah Penempatan PNS 19 ASN
4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 207.500.000,- realisasi keuangan Rp. 207.141.400,-



- atau sebesar 99.83% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu yang disetujui dengan Jumlah PNS yang mengurus Kenaikan Pangkat 1.420 ASN.
5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 169.958.000,- realisasi keuangan Rp121.977.324,- atau sebesar 71.77% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah Aplikasi yang tersedia dengan Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Jaringan.
 6. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.500.000,- realisasi keuangan Rp. 15.266.100,- atau sebesar 87.23% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya dengan Jumlah ASN yang menerima Satya Lancana Karya Satya 118 PNS.
 7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 49.597.000,- atau sebesar 99.20% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kasus Pelanggaran disiplin yang diselesaikan dengan Jumlah Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani 59 PNS.
 8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 24.000.000,- realisasi keuangan Rp. 17.000.000,- atau sebesar 70,83 Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta bantuan tugas belajar dengan Jumlah ASN Penerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 2 orang ASN



9. Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat , Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) , jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 39.000.000- atau sebesar 97.50% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kebutuhan diklat sesuai dengan hasil analisis dengan Jumlah Analisis Kebutuhan Diklat sebanyak 1 laporan dan Monitoring Kebutuhan Diklat di 23 Kecamatan 10 OPD.
10. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses mutasi PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.500.000,- realisasi keuangan Rp. 14.500.000,- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah mutasi PNS yang disetujui dengan Jumlah Proses Mutasi PNS 150 ASN
11. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 49.400.200,- atau sebesar 98.80% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah usulan bezetting e-formasi aparatur dengan Jumlah Bezetting Formasi yang terproses 1 Dokumen dengan 7638 PNS
12. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi keuangan Rp. 15.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kenaikan gaji berkala yang tepat waktu yang tertangani dengan Jumlah PNS yang mengurus Kenaikan Gaji Berkala dan Inpassing PNS 3.448 PNS



13. Pengelolaan administrasi pensiun PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 103.292.000,- realisasi keuangan Rp. 102.380.908,- atau sebesar 99.12% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah pensiun yang terlaksana dengan Jumlah ASN yang mengurus administrasi Pensiun 170 PNS
14. Pengambilan sumpah bagi CPNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 208.000,- realisasi keuangan Rp. 0,- atau sebesar 0% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang mengikuti sumpah dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
15. Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi keuangan Rp. 109.998.800,- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin PNS dengan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Disiplin 800 PNS di 8 Kecamatan.
16. Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi keuangan Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah pengadaan kartu isteri 87 kartu, kartu suami 91 kartu, Kartu Pegawai 182 kartu, dan Taspen yang terfasilitasi 12 Kartu.
17. Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi keuangan Rp. 14.991.700,- atau sebesar 99.94% Dengan sasaran berupa Jumlah penanganan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS dengan Jumlah penanganan pemberian izin perkawinan dan perceraian 40 PNS.



18. Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 84.800.000,- atau sebesar 84.80% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang di fasilitasi dengan jumlah dukungan pelaksanaan fasilitasi profesi ASN (korpri) 2 kegiatan
19. Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I , jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 33.000.000,- realisasi keuangan Rp. 32.996.100,- atau sebesar 99.99% Dengan sasaran berupa Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan struktural dengan Jumlah MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan structural di 12 Kecamatan
20. Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur II, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 39.987.400,- atau sebesar 99.97% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan fungsional dengan Jumlah MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan fungsional di 16 Kecamatan.
21. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 622.016.320,- realisasi keuangan Rp. 597.088.800,- atau sebesar 95.99% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang memenuhi syarat dalam kompetensi jabatan dengan Jumlah pejabat Es II yang mengikuti tes kompetensi 39 ASN



➤ **Urusan Rutin**

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian
			Target	Realisasi	Kinerja
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses/diagenda	1.300 Surat	1.300 Surat	100%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	100%
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jenis Kebersihan serta bahan pembersih kantor	3 Orang	3 Orang	100%
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	12 Jenis	91 jenis	100%
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	36.000 lembar	36.000 lembar	100%
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik	8 jenis	8 jenis	100%



7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media surat kabar	3 media	4 media	133.3%
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	900 Dos	900 Dos	100%
9.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah	18 kali	55 kali	305.5%
10.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	200 kali	224 kali	112%
11.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga honorer	22 Orang	22 Orang	100%

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 7.800.000,- realisasi keuangan Rp. Rp. 7.800.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah surat yang diproses/diagenda dengan Jumlah Materai 6000 sebanyak 1.300 lembar



2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 41.000.000,- realisasi keuangan Rp. 40.221.771.- atau sebesar 98.10% Adapun sasaran kegiatan Jumlah rekening yang dibayarkan dengan Jumlah 3 Jaringan telepon, Jaringan Air dan Jaringan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 64.500.000.- realisasi keuangan Rp. 64.500.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah jasa kebersihan kantor dan jenis Kebersihan serta bahan pembersih kantor dengan Jumlah tenaga Kebersihan 3 Orang.
4. Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 10.000.000.- realisasi keuangan Rp. 10.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah jenis ATK dengan Jumlah jenis ATK 91 Jenis
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 11.700.000.- realisasi keuangan Rp. 11.700.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan Jumlah Penggandaan 36.000 lembar
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.000.000.- realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah jenis alat listrik dengan Jumlah jenis Alat Listrik 8 jenis
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 3.000.000.- realisasi keuangan Rp. 3.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah media surat kabar dengan Jumlah media surat kabar 4 media.



8. Penyediaan makanan dan minuman, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 21.150.000.- realisasi keuangan Rp. 21.150.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah makanan dan minuman dengan Jumlah Makanan 450 Dos dan Jumlah Minuman 450 Dos
9. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 399.095.850.- realisasi keuangan Rp. 398.659.000.- atau sebesar 99.89% Adapun sasaran kegiatan Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri dengan Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri 55 kali
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 149.247.500.- realisasi keuangan Rp. 149.044.000.- atau sebesar 99.86% Adapun sasaran kegiatan Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri dengan Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri 224 kali
11. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 407.000.000.- realisasi keuangan Rp. 407.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah tenaga honorer dengan Jumlah Tenaga Honorer 22 orang.



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	6 unit	6 unit	100%
2.	Pengadaan Meubeler	Jumlah jenis pengadaan meubelair	2 Jenis	2 Jenis	100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18 unit	36 Unit	200%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	13 unit	7 Unit	53.9%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	10 unit	6 unit	60%



Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 168.556.650.- realisasi keuangan Rp. 106.650.000.- atau sebesar 63.27% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor dengan Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 6 unit
2. Pengadaan Meubeler, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 30.000.000.- realisasi keuangan Rp. 30.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah jenis pengadaan meubelair dengan Jumlah jenis pengadaan Meubeler 2 jenis
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 69.000.000.- realisasi keuangan Rp. 64.781.000.- atau sebesar 93.89% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dipelihara 36 Unit
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.460.000.- realisasi keuangan Rp. 5.460.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara dengan Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 7 unit
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.000.000.- realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara dengan Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 6 unit.



3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	150 Orang	100%
2.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 40.000.000.- realisasi keuangan Rp. 40.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian dengan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 150 ASN
2. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 15.000.000.- realisasi keuangan Rp. 14.999.900.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemantauan kerja aparatur dengan Jumlah 3 Dokumen.



4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No.	Kegiatan	Indikator Output	Keluaran (output)		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran	2 Laporan	2 Laporan	100%
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
5.	Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah	Jumlah dokumen RKBU yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD)	Jumlah pemeliharaan aset yang dilakukan tepat waktu	5 Laporan	5 Laporan	100%



Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 11.000.000.- realisasi keuangan Rp. 10.998.600.- atau sebesar 99.99% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen
2. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 10.000.000.- realisasi keuangan Rp. 10.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah pelaporan keuangan semesteran dengan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.500.000.- realisasi keuangan Rp. 5.500.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun dengan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 50.000.000.- realisasi keuangan Rp. 49.999.600 atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun dengan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun 8 Dokumen
5. Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.000.000.- realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah dokumen RKBU yang tersusun dengan Jumlah dokumen RKBU yang tersusun 1 Dokumen



6. Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD), jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.000.000.- realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah pemelirahaan aset yang dilakukan tepat waktu dengan Jumlah laporan aset yang tersusun 5 laporan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Solusi yang dilakukan

Berdasarkan data capaian keluaran (output) diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai sudah memenuhi target bahkan melampaui target dan ada yang ditetapkan hal ini tidak terlepas dari sumber daya aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Dalam kegiatan pengambilan sumpah CPNS tidak dilaksanakan dikarenakan pada tahun 2019 CPNS masih melaksanakan pelatihan dasar kepemimpinan dan sementara dalam pengurusan SK 100%.

Untuk meminimalisir tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam memantau dan mengawasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dalam penggunaan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya sangatlah dipergunakan sebaik mungkin. Walaupun pada dasarnya sumber daya manusia yang ada sangatlah kurang tetapi bisa diatasi dengan baik. Hal ini tidak lepas dari komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengatasi semua permasalahan yang ada terkait tugas pokok dan fungsinya yang ada telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2019 maupun sasaran strategis jangka menengah.

3.2. Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada awal tahun 2019 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 9.691.722.289.- dengan rincian Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.064.764.969.- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.626.957.320.- namun dalam perubahan anggaran 2019 menjadi sebesar Rp. 10.111.300.947.- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.034.218.627.- dan Belanja Langsung Rp. 5.077.082.320.- artinya bahwa BKPSDM Kab. Banggai mendapat pengurangan anggaran di belanja tidak langsung sebesar 0.60% dan penambahan anggaran di belanja langsung sebesar 9.73%.

Adapun anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai tahun 2019 sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3
Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran 2019
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1.	Belanja	9.891.722.289	10.111.300.947	419.578.858	4.33
2.	Belanja Tidak Langsung	5.064.764.969	5.034.218.627	(30.546.342)	(0.60)
3.	Belanja Pegawai	5.064.764.969	5.034.218.627	(30.546.342)	(0.60)
4.	Belanja Langsung	4.626.957.320	5.077.082.320	450.125.000	9.73
5.	Belanja Pegawai	404.000.000	413.000.000	9.000.000	2.23
6.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.957.320	4.465.525.670	302.568.350	7.27
7.	Belanja Modal	60.000.000	198.556.650	138.556.650	230.93

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai

No. Urut	Uraian	Alokasi	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
5	Belanja	10.111.300.947	9.588.221.353	1.049.377.685	94.83
5.1	Belanja Operasi	9.912.744.297	9.451.571.353		95.35
5.1.1	Belanja Pegawai	5.034.218.627	4.722.320.237		93.80
5.1.2	Belanja Barang dan jasa	4.878.525.670	4.729.251.116		96.94
5.2	Belanja Modal	198.556.650	136.650.000		68.82
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.556.650	136.650.000		68.82

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai sebesar **Rp. 9.589.364.612.-** atau sebesar **94.84%** dibawah anggaran yang telah disediakan mencerminkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 521.936.335.-** Adapun Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat pada table berikut :



Tabel 3.5.
Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
Urusan Pemerintahan	: 4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian				
Unit Organisasi	: 4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Sub Unit Organisasi	: 4.05 . 4.05.01 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5	BELANJA	10.111.300.947,00	0,00	9.588.221.353,00	9.588.221.353,00	(523.079.594,00)
5.1	BELANJA OPERASI	9.912.744.297,00	0,00	9.451.571.353,00	9.451.571.353,00	(461.172.944,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.034.218.627,00	0,00	4.722.320.237,00	4.722.320.237,00	(311.898.390,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.911.728.434,00	0,00	2.762.534.122,00	2.762.534.122,00	(149.194.312,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	2.261.407.788,00	0,00	2.117.126.736,00	2.117.126.736,00	(144.281.052,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga - LRA	197.253.301,00	0,00	197.253.301,00	197.253.301,00	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan - LRA	208.843.750,00	0,00	208.843.750,00	208.843.750,00	0,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional - LRA	4.944.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	(3.024.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum - LRA	62.831.250,00	0,00	61.260.000,00	61.260.000,00	(1.571.250,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras - LRA	115.897.347,00	0,00	115.799.580,00	115.799.580,00	(97.767,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	1.528.160,00	0,00	1.307.917,00	1.307.917,00	(220.243,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji - LRA	33.642,00	0,00	33.642,00	33.642,00	0,00
5.1.1.01.25	Jaminan Kesehatan - LRA	58.989.196,00	0,00	58.989.196,00	58.989.196,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.122.490.193,00	0,00	1.959.786.115,00	1.959.786.115,00	(162.704.078,00)
5.1.1.02.09	Belanja Tambahan Penghasilan - LRA	2.122.490.193,00	0,00	1.959.786.115,00	1.959.786.115,00	(162.704.078,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.878.525.670,00	0,00	4.729.251.116,00	4.729.251.116,00	(149.274.554,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	266.059.500,00	0,00	265.558.700,00	265.558.700,00	(500.800,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor - LRA	229.679.500,00	0,00	229.594.700,00	229.594.700,00	(84.800,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) - LRA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - LRA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - LRA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - LRA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.01.10	Belanja Dekorasi - LRA	7.580.000,00	0,00	7.164.000,00	7.164.000,00	(416.000,00)
5.1.2.01.11	Belanja Dokumentasi - LRA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	42.560.000,00	0,00	42.560.000,00	42.560.000,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar - LRA	42.560.000,00	0,00	42.560.000,00	42.560.000,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.561.191.000,00	0,00	1.476.997.695,00	1.476.997.695,00	(84.193.305,00)
5.1.2.03.01	Belanja Telepon - LRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.02	Belanja Air - LRA	10.500.000,00	0,00	10.232.000,00	10.232.000,00	(268.000,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik - LRA	40.000.000,00	0,00	39.989.771,00	39.989.771,00	(10.229,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah - LRA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet - LRA	70.000.000,00	0,00	22.019.324,00	22.019.324,00	(47.980.676,00)
5.1.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor - LRA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.03.15	Belanja Publikasi - LRA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.03.18	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LRA	986.300.000,00	0,00	978.600.000,00	978.600.000,00	(7.700.000,00)
5.1.2.03.20	Belanja Transportasi dan Akomodasi - LRA	366.831.000,00	0,00	339.146.600,00	339.146.600,00	(27.684.400,00)
5.1.2.03.30	Belanja Jasa Service Perlengkapan Gedung Kantor - LRA	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
5.1.2.03.33	Belanja Jasa Cleaning Service - LRA	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.2.03.36	Belanja Jasa Petugas Keamanan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.42	Belanja Jasa Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan - LRA	7.600.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	(50.000,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.000.000,00	0,00	64.781.040,00	64.781.040,00	(4.218.960,00)
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	15.000.000,00	0,00	10.781.040,00	10.781.040,00	(4.218.960,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	279.927.500,00	0,00	278.800.000,00	278.800.000,00	(1.127.500,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak - LRA	75.860.000,00	0,00	74.732.500,00	74.732.500,00	(1.127.500,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan - LRA	201.597.500,00	0,00	201.597.500,00	201.597.500,00	0,00
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan - LRA	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat - LRA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - LRA	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	(3.500.000,00)
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda - LRA	9.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	(3.500.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	814.459.000,00	0,00	793.911.273,00	793.911.273,00	(20.547.727,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - LRA	48.450.000,00	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00	(1.500.000,00)
5.1.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan - LRA	739.309.000,00	0,00	722.261.273,00	722.261.273,00	(17.047.727,00)
5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur - LRA	26.700.000,00	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	(2.000.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakai Khusus dan Hari-hari Tertentu	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.1.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga - LRA	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.191.213.670,00	0,00	1.185.352.408,00	1.185.352.408,00	(5.861.262,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LRA	387.088.500,00	0,00	386.098.000,00	386.098.000,00	(990.500,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - LRA	804.125.170,00	0,00	799.254.408,00	799.254.408,00	(4.870.762,00)
5.1.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.17.01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.19.05	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	22.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(7.000.000,00)
5.1.2.22.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 - LRA	22.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(7.000.000,00)
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	134.115.000,00	0,00	111.790.000,00	111.790.000,00	(22.325.000,00)
5.1.2.23.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan - LRA	134.115.000,00	0,00	111.790.000,00	111.790.000,00	(22.325.000,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	413.000.000,00	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00
5.1.2.26.02	Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap - LRA	408.250.000,00	0,00	408.250.000,00	408.250.000,00	0,00
5.1.2.26.07	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LRA	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	198.556.650,00	0,00	136.650.000,00	136.650.000,00	(61.906.650,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.556.650,00	0,00	136.650.000,00	136.650.000,00	(61.906.650,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	198.556.650,00	0,00	136.650.000,00	136.650.000,00	(61.906.650,00)
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair - LRA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin - LRA	67.313.500,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	(61.763.500,00)
5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - LRA	101.243.150,00	0,00	101.100.000,00	101.100.000,00	(143.150,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(10.111.300.947,00)	0,00	(9.588.221.353,00)	(9.588.221.353,00)	523.079.594,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.111.300.947,00)	0,00	(9.588.221.353,00)	(9.588.221.353,00)	523.079.594,00



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 program dan 49 kegiatan pada tahun 2019 dalam Belanja Langsung **Rp.5.077.082.320,-**. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.865.901.116,-** atau sebesar **95.84%** yang artinya dalam pelaksanaannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat mengefesienkan biaya dalam memaksimalkan semua program dan kegiatannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai tahun 2019 yang dapat kami sajikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat.